



Article Informations
Corresponding Email:
alharun.rasyid01@gmail.com

Received: 23/06/2025; Accepted:
23/08/2025; Published: 15/10/2025

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PENINGKATAN PENGUNGSI ROHINGYA TAHUN 2021-2023

Harun Al Rasyid¹, Angga Nurdin Rachmat², Jusmalia Oktaviani³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang ramah terhadap isu kemanusiaan salah satunya merespons pengungsi dari luar negeri. Namun, respons inklusif tersebut mengalami tantangan ketika dihadapkan dengan peningkatan pengungsi Rohingya ke Indonesia di tahun 2021-2023. Peneliti menganalisis perubahan respons yang dilakukan oleh Indonesia terhadap pengungsi Rohingya khususnya yang mendarat di Aceh. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analisis eksplanatif, peneliti mengumpulkan data-data sekunder yang dapat digunakan untuk memaknai hubungan kausalitas dari fenomena yang diteliti menggunakan teori pilihan peneliti. Hasil penelitian mengarah pada dengan disebabkan dampaknya dampak negatif pengungsi Rohingya bagi Indonesia, mengakibatkan Indonesia bersikap skeptis terhadap kehadiran pengungsi Rohingya sebagai ancaman keamanan. Diperkuat oleh perspektif Konstruktivisme teori Sekuritisasi, peneliti menemukan terdapat fenomena konstruksi sosial oleh masyarakat Aceh dan elit politik Indonesia yang membentuk identitas pengungsi Rohingya sebagai *the existential threat* bagi keamanan Indonesia di tahun 2023. Maka dari itu, pola-pola interaksi yang diberikan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya berubah ke arah skeptis bahkan cenderung menolak kehadiran pengungsi Rohingya di tahun 2023.

Kata Kunci: Masyarakat Aceh, Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Pengungsi Rohingya, Konstruksi Sosial, Sekuritisasi.

Abstract

Indonesia is a friendly country towards humanitarian issues which one of them goes for responding to refugees from a foreign country. However, such an inclusive response has happened to face a challenge from the rising numbers of Rohingya refugees towards Indonesia in 2021-2023. The researcher analyzes the shifting response of Indonesia towards Rohingya refugees specifically whom harboring themselves around Aceh. By using qualitative

research method explanatory analysis, the researcher collects secondary data which can be utilized to interpret causal effects within the phenomenon by using the researcher's chosen theory. The research result leads to argue the cause of negative impacts from Rohingya refugees towards Indonesia, have affected Indonesia to behave sceptical towards the presence of Rohingya refugees as a security threat. Forged with the Constructivist approach Securitization theory, the researcher found a socially-constructed phenomenon by Acehnese and Indonesia's political elite to shape Rohingya refugee's identity as the existential threat by Indonesia's security in 2023. Henceforth, the patterns of interaction from Indonesia towards the Rohingya refugees have shifted to be sceptical and even tend to refuse the presence of Rohingya refugees in 2023.

Keywords: *Acehnese, Indonesia's Foreign Policy, Rohingya Refugees, Socially-Constructed, Securitization.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang ramah terhadap isu kemanusiaan. Sikap ini tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Indonesia, melainkan juga dinaungi oleh Presiden Joko Widodo sebagai aktor negara. Hal ini menjadikan pola kebijakan luar negeri Indonesia bersikap inklusif dalam merespons isu-isu kemanusiaan di tingkat internasional salah satunya yaitu menghadapi dinamika dari pengungsi luar negeri.

Menurut Dr. Fithriatus Shalihah, umumnya pengungsi merupakan kelompok etnis minoritas dari negara asal yang seringkali mendapat perlakuan kurang baik dari negara tersebut. Hal ini mendorong mereka untuk mencari rasa aman ke negara lain yang dianggap dapat menganugerahkan perlindungan di suatu wilayah agar terhindar dari bahaya-bahaya besar¹. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa pengungsi merupakan kelompok minoritas dari luar negeri yang mencoba menyelamatkan diri dari dengan cara singgah ke negara lain agar dapat bertahan hidup dari hal-hal yang mengancam nyawa nya.

Sikap inklusif Indonesia terhadap pengungsi luar negeri tercermin dari Peraturan Presiden (Perpres) Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 terkait Pengungsi dari Luar Negeri. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa Indonesia mengidentifikasi pengungsi sebagai orang asing yang takut akan persekusi

¹Shalihah, Fithriatus., Nur, Muhammad. (2021). *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. Halaman 1.

atas suku, ras, agama, serta kebangsaan². Kebijakan ini mengkonstruksi cara pandang Indonesia terhadap pengungsi luar negeri sebagai manusia yang perlu ditolong akibat kudeta militer di Myanmar. Kemurahan hati dalam menolong pengungsi tersebut tidak perlu dibatasi secara skeptis baik dari perbedaan suku, ras, serta agama.

Pada Pasal 9 ditegaskan bahwa Indonesia perlu memberikan pertolongan darurat berupa membawa pengungsi ke pelabuhan terdekat diikuti dengan bantuan medis untuk menjamin keselamatan para pengungsi tersebut³. Hal ini menimbulkan ekspektasi bahwa Indonesia memandang pengungsi luar negeri sebagai korban krisis politik-keamanan dan diutamakan keselamatannya dibanding menelusuri terlebih dahulu latar belakang serta potensi keamanannya.

Kebijakan luar negeri tersebut membuat Indonesia terbuka untuk menerima pengungsi Rohingya sebagai negara penerima (*host country*) yang bersifat temporer. Terhitung sejak 31 Desember 2016, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mencatat sekitar 274-1000 pengungsi Rohingya telah berdatangan dan bertambah ke Indonesia. Sejumlah pengungsi Rohingya tersebut ditemukan atas kerjasama UNHCR Indonesia, warga setempat, serta pihak berwajib Indonesia. Sejumlah pengungsi Rohingya tersebut terombang-ambing di sekitar perairan Indonesia khususnya Aceh setelah ditelantarkan oleh jaringan penyelundupan manusia dari Myanmar⁴. Hal ini tentu sejalan dengan Perpres No. 125 Tahun 2016 dari Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan bahwa Indonesia siap merespons secara inklusif terhadap pengungsi Rohingya yang sedang membutuhkan bantuan darurat.

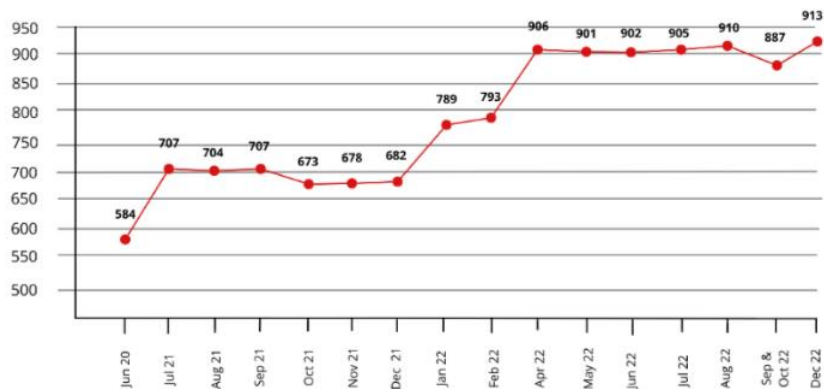
²Hukum Online. (Diakses pada 2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*. Halaman 1.

³Hukum Online. (Diakses pada 2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*. Halaman 3

⁴Suryono, Mitra. (2016). *Indonesia Fact Sheet December 2016*. Halaman 2.

Gambar 1.1. Grafik Pengungsi Rohingya di Indonesia (2020-2022)⁵

Grafik 1.
Grafik Pengungsi Rohingya di Indonesia (2020-2022)



Sumber: Indradipradana, RK & Haridha, F. (2023). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022*. Halaman 215.

Tidak berhenti sampai disitu, pertambahan pengungsi Rohingya ke Indonesia semakin meningkat khususnya di tahun 2020-2022. Berdasarkan data dari Indradipradana, pertambahan pengungsi Rohingya ke Indonesia terlihat semakin meningkat. Jumlah pertambahan pengungsi Rohingya tersebut mencapai 584-913 orang. Semakin banyak jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia, maka semakin meningkat pula potensi ancaman keamanan nasional yang dapat dirasakan oleh Indonesia dalam mengkondisikan pengungsi Rohingya yang sudah khususnya di Aceh.

Bagi peneliti, sikap inklusif Indonesia dapat dilihat sebagai “*benefit of the doubts*” (keuntungan dari keraguan yang sedang dihadapi) oleh kedua

⁵Indradipradana, RK & Haridha, F. (2023). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022*. Halaman 215.

belah pihak. Indonesia dapat diuntungkan dengan cara dilihat sebagai negara yang murah hati oleh lingkup internasional, diikuti dengan pengungsi luar negeri yang diuntungkan dengan cara mendapat kesempatan untuk berlabuh dan diterima secara baik di negara yang sedang mereka tuju. Namun, keraguan tetap hadir khususnya yang dapat dirasakan oleh Indonesia sebagai negara. Salah satu keraguan tersebut yaitu potensi terbuka nya isu-isu keamanan nasional Indonesia yang bisa saja muncul di kemudian hari setelah sejumlah pengungsi luar negeri tersebut diterima.

Mengejutkan ketika Indonesia menunjukkan sikap berbeda yang signifikan di tahun 2023. Pada tanggal 08 Desember 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa segala jenis bantuan kemanusiaan akan diprioritaskan terlebih dahulu kepada masyarakat setempat sebelum disalurkan kepada para pengungsi Rohingya. Hal tersebut diakibatkan oleh mencuatnya indikasi kuat bahwa pengungsi Rohingya terafiliasi oleh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)⁶. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat tergambar kecemasan Indonesia terhadap kehadiran para pengungsi Rohingya di Aceh. Pandangan inklusif untuk pengungsi Rohingya seketika berubah ke arah skeptisisme yang menjadikan Indonesia bersikap memprioritaskan keamanan bagi diri sendiri sebelum melanjutkan bantuan untuk yang lainnya.

Dalam menganalisis fenomena “penolakan” tersebut, peneliti akan menggunakan perspektif Konstruktivisme dari Barry Buzan yang berkembang pada ilmu Hubungan Internasional. Perspektif ini dinilai relevan karena mampu menganalisis justifikasi bahwa terdapat konstruksi identitas berupa *Speech Act* dari pemangku kebijakan yang berakibat suatu fenomena dapat terpolitisasi hingga memerlukan adanya keputusan dari pemangku kebijakan tersebut. Lebih lanjut, kebijakan yang dimaksud akan mengarah pada Sekuritisasi sebagai upaya pemangku kebijakan tersebut untuk mengembalikan rasa aman bagi negara yang sedang ia pimpin.

⁶Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. (2023). *Press Statement of President of the Republic of Indonesia Regarding the Rohingya Refugees Entering Indonesia, at Merdeka Palace, Jakarta Capital Province, December 8, 2023.*

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menarik rumusan masalah yaitu “*mengapa Indonesia mengubah kebijakan luar negeri terhadap peningkatan pengungsi Rohingya di tahun 2023?*”. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran umum perihal kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi permasalahan pengungsi. Tujuan khusus penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan alasan yang melatarbelakangi Indonesia mengubah kebijakan luar negeri terhadap peningkatan pengungsi Rohingya di tahun 2023.

Peneliti menggunakan tiga tinjauan pustaka yang relevan untuk mengembangkan argumen dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirancang. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut.

Pertama “*Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Indonesia dalam Bidang Politik dan Keamanan di ASEAN Pada Krisis Politik Myanmar Tahun 2021*”. Penelitian tersebut berfokus pada analisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap krisis politik-keamanan Myanmar pada tahun 2021 dengan pendekatan *Regional Leader*. Beliau berpendapat bahwa Indonesia memegang tanggung jawab terhadap interaksi antar negara baik di dalam maupun luar kawasan ASEAN. Kepemimpinan tersebut merujuk pada keterlibatan Indonesia dalam meredam konflik dengan cara-cara yang positif⁷. Salah satu cara-cara positif yang dimaksud bisa saja berupa sikap keterbukaan Indonesia terhadap penerimaan pengungsi Rohingya agar dapat menurunkan tensi politik-keamanan yang sedang dihadapi oleh Myanmar.

Penelitian tersebut juga membahas Indonesia dihadapi oleh tantangan dalam menggalang suara bulat dari negara anggota ASEAN untuk bertindak solutif terhadap krisis politik-keamanan Myanmar tahun 2021. Suara bulat dibutuhkan agar solusi yang diajukan mampu disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN yang menganut sistem konsensus⁸. Salah satu keputusan yang perlu diambil dalam merespons krisis politik-keamanan Myanmar yaitu

⁷Rachmat, AN. (2022). *Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Indonesia dalam Bidang Politik dan Keamanan di ASEAN Pada Krisis Politik Myanmar Tahun 2021*. Halaman 184.

⁸Rachmat, AN. (2022). *Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Indonesia dalam Bidang Politik dan Keamanan di ASEAN Pada Krisis Politik Myanmar Tahun 2021*. Halaman 191.

bagaimana negara-negara anggota ASEAN harus memberikan sikap terhadap pengungsi Rohingya yang bisa saja berdatangan ke negara-negara mereka.

Perbedaan penelitian terletak pada level analisis yang digunakan dalam menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap krisis politik-keamanan Myanmar tahun 2021. Hal ini bertujuan agar dapat ditemukan kebaruan argumen yang terinspirasi dari penelitian sebelumnya terhadap penelitian yang akan diperdalam. Pun penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu argumen yang menguatkan pernyataan bahwa sikap Indonesia terhadap Myanmar dan pengungsi Rohingya cenderung solutif dan inklusif demi berkontribusi untuk menurunkan tensi politik-keamanan Myanmar tahun 2021.

Penelitian sebelumnya menganalisis posisi Indonesia di tingkat sistem internasional. Argumen ini dilihat dari Indonesia yang memosisikan diri sebagai *Regional Leader* untuk mengemban tanggung jawab menjaga interaksi positif antar negara-negara anggota ASEAN⁹. Dalam menggalang suara bulat negara-negara anggota ASEAN terhadap krisis politik-keamanan Myanmar tahun 2021¹⁰, sikap positif Indonesia pasti akan mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk bersikap inklusif terhadap pengungsi Rohingya yang menjadi salah satu korban dari krisis politik-keamanan Myanmar. Maka dari itu, secara sistem internasional Indonesia sudah pasti akan bertindak inklusif tidak hanya bagi negaranya sendiri, melainkan mengajak negara-negara lain untuk menyatukan sikap dalam memberikan respons inklusif terhadap pengungsi Rohingya untuk menurunkan tensi politik-keamanan Myanmar sejak tahun 2021.

Kebaruan yang akan dibawa pada penelitian ini terdapat pada pembahasan di level negara. Dengan adanya sikap inklusif Indonesia di tahun 2021 berdasarkan mengemban tanggung jawab sebagai *Regional Leader* bagi ASEAN, Indonesia harus menerima konsekuensi jika suatu saat sikap tersebut dapat memengaruhi kestabilan Indonesia di tingkat negara baik dari segi ekonomi, politik, maupun keamanan. Sikap inklusif Indonesia

⁹Rachmat, AN. (2022). *Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Indonesia dalam Bidang Politik dan Keamanan di ASEAN Pada Krisis Politik Myanmar Tahun 2021*. Halaman 183.

¹⁰Ibid. Halaman 191.

meningkatkan ekspektasi pengungsi Rohingya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tamu yang aman untuk dituju. Hasilnya yaitu jumlah pertambahan pengungsi Rohingya ke Indonesia semakin meningkat dari tahun 2021 hingga 2023. Jumlah pengungsi yang banyak tersebut tentu akan berpengaruh besar terhadap kesiapan Indonesia di bidang ekonomi, politik, serta keamanan.

Jika terdapat kendala di tingkat negara mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung solutif dan inklusif dalam merespons tensi politik-keamanan Myanmar serta pengungsi Rohingya, maka Indonesia berkemungkinan besar untuk menunjukkan perubahan sikap. Perubahan sikap tersebut dapat dibahas menggunakan teori Sekuritisasi serta *Speech Act* yang akan diperdalam pada penelitian ini.

Kedua, “*Identitas dalam Kebijakan Luar Negeri: Peran Indonesia Pasca Kudeta Militer di Myanmar Tahun 2021*”. Penelitian tersebut menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia pasca kudeta militer di Myanmar dengan menggunakan perspektif Konstruktivisme khususnya konsep Identitas menurut Alexander Wendt. Konsep identitas tersebut digunakan untuk menggambarkan peran Indonesia sebagai *the bridge builder* serta *the global problem solver* dalam menanggapi fenomena pasca kudeta militer Myanmar tahun 2021¹¹. Rosyidin juga menegaskan bahwa perspektif konstruktivisme khususnya konsep peran identitas menjadi penting dalam menganalisis arah kepentingan suatu negara yang nantinya menentukan arah kebijakan luar negeri negara tersebut dalam merespons suatu fenomena hubungan internasional.

Rosyidin juga menegaskan bahwa kepentingan peran identitas Indonesia pasca kudeta militer di Myanmar tahun 2021 adalah menjaga stabilitas kawasan dengan mendorong pemulihan demokrasi, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), serta tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah¹². Hal tersebut merupakan aktualisasi dari identitas peran Indonesia sebagai *the bridge builder* serta *the global problem solver*

¹¹Rosyidin, M. (2021). *Identitas Dalam Kebijakan Luar Negeri: Peran Indonesia Pasca Kudeta Militer di Myanmar Tahun 2021*. Halaman 74

¹²Ibid. Halaman 83.

khususnya bagi Indonesia, Myanmar, serta negara-negara anggota ASEAN. Namun, peneliti meyakini bahwa dengan melekatnya identitas tersebut, Indonesia dipandang sebagai negara yang inklusif serta solutif sehingga menjadi peluang bagi etnis Rohingya untuk mengungsi dalam jumlah yang besar. Maka dari itu, tidak heran jika frekuensi pertambahan pengungsi Rohingya ke Indonesia semakin meningkat khususnya dari tahun 2021-2023.

Peneliti menyetujui bahwa analisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar dan pengungsi Rohingya tahun 2021-2023 dapat dibahas menggunakan perspektif Konstruktivisme khususnya konsep Identitas. Namun, peneliti memberikan kebaruan argumen yang mengangkat konsep identitas difokuskan untuk pengungsi Rohingya. Peneliti akan memperdalam bagaimana Indonesia melihat identitas pengungsi Rohingya yang mengarah pada pemberian label sebagai ancaman keamanan nasional di tahun 2023.

Kebaruan argumen ini diharap dapat memperkaya elaborasi analisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar dan pengungsi Rohingya bagi penstudi Konstruktivisme pada ilmu Hubungan Internasional. Maka dari itu, peneliti akan memperdalam interaksi antara Indonesia sebagai negara dengan pengungsi Rohingya yang dimaknai sebagai entitas luar negeri, dilabeli sebagai potensi ancaman keamanan nasional Indonesia pada tahun 2023.

Ketiga, *“Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh: Evaluasi Kebijakan Indonesia Terhadap Ancaman Keamanan.”* Penelitian tersebut menjabarkan dampak etnis Rohingya mengungsi ke Indonesia dari tahun 2021-2023. Dampak-dampak tersebut hal-hal yang menunjukkan Indonesia melihat pengungsi Rohingya sebagai ancaman keamanan, khususnya ancaman keamanan non-tradisional.

Pertama, jumlah pengungsi Rohingya ke Aceh semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun Indonesia sebagai negara menyatakan kesiapan dalam memberikan bantuan, namun hal tersebut tidak sejalan dengan kemampuan masyarakat Aceh sebagai kelompok masyarakat yang

berdampingan secara langsung dengan pengungsi Rohingya¹³. Maka dari itu, kemampuan Indonesia dalam menampung pengungsi Rohingya khususnya di Aceh semakin menurun hingga puncaknya di tahun 2023 mengalami penolakan dari masyarakat Aceh dan mempengaruhi elit politik Indonesia dalam merumuskan kebijakan.

Kedua, banyaknya frekuensi pengungsi Rohingya yang terlibat pada tindakan-tindakan melanggar hukum. hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat Aceh hingga perlu adanya kehadiran negara secara tegas untuk mengembalikan rasa aman bagi masyarakat Aceh¹⁴. Maka dari itu, muncul urgensi Indonesia sebagai negara untuk mengambil keputusan seperti upaya sekuritisasi dengan melabeli pengungsi Rohingya sebagai ancaman keamanan bagi Indonesia.

Ketiga, peneliti tersebut menemukan adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum pengungsi Rohingya seperti penyelundupan senjata maupun benda-benda terlarang ke dalam wilayah Indonesia. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa pengungsi Rohingya mengetahui celah-celah keamanan Indonesia sehingga mudah untuk dilewati oleh kelompok ekstrimis dari Myanmar¹⁵. Celah-celah tersebut yang membuat Indonesia memprioritaskan keamanan negara diatas bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Aceh.

Ketiga poin tersebut relevan karena mampu memperkuat argumen peneliti dalam melihat perkembangan perubahan cara pandang Indonesia merespons peningkatan pengungsi Rohingya dari tahun 2021-2023. Semakin meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya ke Indonesia, maka semakin meningkat pula potensi ancaman keamanan yang dapat dirasakan oleh Indonesia baik bagi negara maupun masyarakat Aceh. Namun, peneliti akan membawa kebaruan argumen yang menyatakan bahwa terdapat campur tangan antara masyarakat Aceh serta pemerintah Indonesia dalam mengkonstruksi perubahan identitas pengungsi Rohingya dari korban

¹³Akbar, R., Bukhari, FR., Hamadi, IG. (2024). *Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh: Evaluasi Kebijakan Indonesia Terhadap Ancaman Keamanan*. Halaman 2.

¹⁴Akbar, R., Bukhari, FR., Hamadi, IG. (2024). *Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh: Evaluasi Kebijakan Indonesia Terhadap Ancaman Keamanan*. Halaman 6.

¹⁵Ibid. Halaman 2.

politik-keamanan Myanmar menjadi ancaman keamanan Indonesia. Argumen tersebut akan diperkuat menggunakan perspektif konstruktivisme dengan menggambarkan masyarakat Aceh sebagai *the security agent* serta Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai representasi negara yang mengeluarkan *Speech Act* sebagai upaya sekuritisasi. Upaya tersebut merupakan respons yang menyatakan berubahnya cara pandang Indonesia terhadap peningkatan pengungsi Rohingya hingga puncaknya di tahun 2023.

2. PEMBAHASAN

Pada periode tahun 2021-2022, Indonesia memiliki kecenderungan untuk bersikap inklusif kepada pengungsi luar negeri salah satunya dalam menangani pengungsi Rohingya. Hal ini didorong oleh dua kondisi. Pertama, fenomena kudeta militer Myanmar tahun 2021 yang sulit untuk dicegah sehingga meningkatkan kemungkinan etnis Rohingya berbondong-bondong mengungsi dari negara asal. Kedua, pengungsi Rohingya yang mendapat pertolongan oleh Indonesia baik sebagai negara maupun masyarakat setempat khususnya Aceh.

Sikap Indonesia Sebagai Negara Terhadap Pengungsi Rohingya Tahun 2021-2022

Melalui Perpres 125/2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada pihak-pihak berwenang untuk melakukan tindak pertolongan terhadap pengungsi Rohingya yang sedang terombang-ambing di sekitar pesisir Aceh. Hal tersebut dilakukan sebagai kontinuitas sikap Indonesia untuk terbuka memprioritaskan keselamatan pengungsi Rohingya di atas upaya penyelidikan potensi keamanannya¹⁶. Bagi peneliti, fenomena tersebut membuat Indonesia melonggarkan sistem keamanan demi kemanusiaan yang memudahkan pengungsi Rohingya dalam mobilisasi keluar masuk ke Indonesia khususnya di sekitar pesisir Aceh.

¹⁶BBC News. (2023). *Pengungsi Rohingya Tembus 1.600 Orang, Mengapa Nelayan Aceh Menolong Mereka?*

Pada 31 Desember 2021, Presiden Joko Widodo memberikan izin kepada nelayan-nelayan di Aceh serta pemerintah setempat untuk memberikan pertolongan secara langsung ke pengungsi Rohingya yang sedang terombang-ambing di pesisir pantai¹⁷. Langkah Presiden Joko Widodo tersebut merupakan sikap elit politik yang merepresentasikan Indonesia sebagai negara dalam merespons pengungsi Rohingya sebagai entitas luar negeri.

Pertolongan yang diberikan oleh Indonesia sebagai negara dilihat sebagai sikap solutif dalam menyikapi dampak dari kudeta militer Myanmar tahun 2021 yang tidak terelakkan. Mengingat bahwa tahun 2021 masih diselimuti dengan kekhawatiran penyebaran Covid-19, Indonesia meningkatkan kualitas bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya berupa *screening* kesehatan, dilengkapi dengan protokol kesehatan, serta pendataan bagi para pengungsi Rohingya yang telah berdatangan ke Aceh¹⁸. Langkah ini dianggap tepat agar Indonesia mampu mempertahankan pengungsi Rohingya di Aceh untuk dilabeli sebagai korban ketidakstabilan politik-keamanan di Myanmar. Selain itu, hal ini bertujuan untuk memudahkan Indonesia dalam mengupayakan mobilisasi keluar-masuk pengungsi Rohingya secara legal oleh negara.

Di sisi lain, Menlu Retno Marsudi mengupayakan sikap inklusif Indonesia di ranah internasional khususnya ASEAN. Sikap tersebut tercermin pada *Kofi Annan Report* 5PC berisi tentang mengembalikan rasa stabilitas keamanan, menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan, perlindungan bagi semua warga tanpa memandang unsur suku dan agama, serta membuka akses untuk menerima bantuan kemanusiaan¹⁹. Dengan begitu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam merespons peningkatan pengungsi Rohingya dari Myanmar cenderung ke arah solutif dan inklusif.

¹⁷Fakhrurrazi. (2021). *Izinkan Pengungsi Rohingya Berlabuh, Nelayan Aceh Berterima Kasih Kepada Jokowi*.

¹⁸Bestari, Novina Putri. (2021). *Jokowi: Demi Kemanusiaan, RI Tampung 105 Pengungsi Rohingya*.

¹⁹Fikri, AA., Mayola, J. (2024). *Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023*. Halaman 58.

Sikap-sikap tersebut menunjukkan respons Indonesia sebagai negara cenderung berpola terbuka dalam menerima pengungsi Rohingya di tahun 2021-2022. Namun dengan tidak diratifikasinya Konvensi 1951, Indonesia berpegang teguh pada peran sebagai negara penampung sementara sambil menunggu sejumlah pengungsi Rohingya tersebut dimobilisasi ke negara lain²⁰. Maka dari itu, Indonesia memiliki ekspektasi bahwa bantuan yang dapat diberikan kepada pengungsi Rohingya sejatinya berjumlah terbatas.

Pandangan Masyarakat Aceh Terhadap Pengungsi Rohingya Tahun 2021-2022

Sikap empati dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya tidak hanya dilakukan oleh Indonesia sebagai negara, namun juga diikuti oleh respons masyarakat Aceh yang secara langsung hidup berdampingan dengan pengungsi Rohingya di sekitar lokasi pengungsian. Mevy Eka Nurhalizah menyebutkan terdapat tiga peran agama yang memperkuat sikap inklusif masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya di sekitar tahun 2021-2022. Pertama, agama sebagai identitas sosial. Kedua, agama sebagai dasar solidaritas. Ketiga, Agama sebagai dasar opini publik²¹. Mengetahui bahwa mayoritas etnis Rohingya memeluk agama Islam, hal tersebut memperkuat motivasi masyarakat Aceh (sebagai sesama muslim) untuk menolong tidak hanya sebatas moral kemanusiaan, melainkan juga sebagai pengaplikasian nilai-nilai solidaritas sesama muslim.

Argumen ini juga diperkuat oleh Maria Elsa Karina yang menyebutkan bahwa ajaran agama mendorong ekspresi belas kasih terhadap imigran yang sedang membutuhkan pertolongan. Hal tersebut memotivasi masyarakat Aceh untuk menciptakan konstruksi sosial bahwa pengungsi Rohingya harus dilihat sebagai saudara sesama muslim yang perlu ditolong berlandaskan rekan seagama²². Maka dari itu, pengungsi Rohingya dapat diuntungkan

²⁰Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*.

²¹Nurhalizah, Mevy Eka. (2025). *Dinamika Identitas Agama dan Etnis dalam Penerimaan Pengungsi Rohingya*.

²²Karina, Maria Elsa. (2020). *Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya*. Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR) Volume 2 Nomor 2. Halaman 161.

dengan cara dilihat sebagai entitas luar negeri yang perlu diterima secara baik oleh masyarakat serta negara Indonesia.

Perspektif Konstruktivisme dapat digunakan dalam menganalisis agama sebagai identitas yang dapat mempengaruhi interaksi sosial di lingkup hubungan internasional. Konstruktivisme meyakini bahwa interaksi hubungan internasional yang dipengaruhi oleh agama akan menghasilkan identitas kolektif yang dapat mempengaruhi persepsi satu sama lain²³. Dengan adanya kesamaan memeluk agama Islam baik dari masyarakat Aceh maupun pengungsi Rohingya, maka interaksi dari kedua belah pihak tersebut menghasilkan identitas kolektif berupa “saudara seagama”. Sehingga, pola interaksi yang terjadi antara masyarakat Aceh serta pengungsi Rohingya cenderung bersikap rukun dan saling tolong-menolong khususnya di sekitar tahun 2021-2022.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN JUMLAH PENGUNGSI ROHINGNYA SEMAKIN MENINGKAT KE INDONESIA

Dalam menganalisis mobilisasi pengungsi Rohingya yang cenderung meningkat di sekitar tahun 2021-2023, peneliti menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi fenomena peningkatan pengungsi Rohingya ke Indonesia di tahun-tahun tersebut. Peneliti menemukan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menjadikan fluktuasi pengungsi Rohingya ke Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu faktor geografis, faktor demografis, serta faktor hubungan pengungsi Rohingya dan Pemerintah Myanmar.

Faktor Geografis yang Membuat Indonesia Menjadi Tempat Terdekat Bagi Pengungsi Jalur Laut

Pertama secara geografis, Indonesia banyak berbatasan dengan negara-negara lain khususnya di sekitar Asia Tenggara. Didorong oleh kedekatan geografis antara Myanmar dan Aceh yang dapat ditempuh melewati jalur laut, hal ini mendukung pengungsi Rohingya untuk dengan mudah mengungsi

²³Rahman, Junita Budi & Bainus, Arry. (2024). *Agama dalam Hubungan internasional (Religion in International Relations)*. Halaman 14.

diri ke Indonesia. Didukung oleh karakteristik masyarakat pesisir yang memiliki pengetahuan terbatas terkait ancaman keamanan dari pengungsi luar negeri²⁴. Hal-hal tersebut memudahkan mobilisasi pengungsi Rohingya untuk segera diterima oleh Indonesia khususnya oleh masyarakat pesisir pantai yang didasari oleh empati secara kemanusiaan. Pun didorong oleh instruksi Perpres No. 125/2016 terkait pengungsi luar negeri yang memprioritaskan keselamatan pengungsi di tengah-tengah laut agar segera dapat dievakuasi.

Daerah-daerah Aceh yang dijadikan sebagai pendaratan pertama oleh pengungsi Rohingya diantaranya yaitu Lhokseumawe, Sabang, Idi Rayeuk, dan Aceh Timur. Para pengungsi tersebut dikabarkan setidaknya butuh waktu hingga 23 hari terombang-ambing di lautan hingga akhirnya mendarat di daerah-daerah Aceh tersebut²⁵. Maka dari itu, sudah dipastikan bahwa pengungsi Rohingya kemungkinan besar mendarat di Indonesia khususnya Aceh karena didasari jarak yang paling dekat dibanding pulau-pulau ataupun negara lainnya dari Myanmar.

Faktor Demografis yang Menunjukkan Kemiripan Identitas Agama Antara Pengungsi Rohingya dan Masyarakat Aceh

Kedua secara faktor demografis, dengan mendaratnya pengungsi Rohingya dan bertemu dengan masyarakat Aceh, interaksi sosial yang terjadi antara kedua aktor tersebut menimbulkan adanya kemiripan dari segi memeluk agama islam. Dengan dilihatnya mayoritas pengungsi Rohingya dan masyarakat Aceh sama-sama memeluk agama islam, hal tersebut mempertebal nilai-nilai nurani kemanusiaan antar kedua belah pihak sehingga terjadi interaksi yang bersifat antusias menolong satu sama lain²⁶. Maka dari itu, interaksi sosial menjadi pendorong bagi pengungsi Rohingya

²⁴Hamdi, MA., Maulidia, H., dan Firlana, H. (2023). *Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingya Pada Provinsi Aceh)*. Halaman 61.

²⁵Hamdi, MA., Maulidia, H., dan Firlana, H. (2023). *Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingya Pada Provinsi Aceh)*. Halaman 63.

²⁶Azhari, Y., Wilopo., (2022). *Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya dan Masyarakat Lokal Indonesia*. Halaman 482

untuk semakin bertambah ke Indonesia khususnya Aceh karena dianggap dapat melakukan integrasi sosial baik dalam jangka waktu dekat maupun panjang.

Faktor Hubungan Pengungsi Rohingya dan Pemerintah Myanmar

Etnis Rohingya merupakan sekelompok masyarakat yang sejak lama tinggal di Myanmar. Dengan adanya mayoritas masyarakat Myanmar dari etnis lain yang sama-sama memeluk agama Budha, posisi etnis Rohingya ditempatkan sebagai kaum minoritas yang memeluk agama berbeda²⁷. Didukung oleh pemerintah Myanmar yang mengkonstruksi identitas etnis Rohingya sebagai teroris²⁸ hingga akhirnya membenarkan perlakuan *ethnic cleansing* terhadap pengungsi Rohingya yang masih berada di Myanmar.

Secara historis, status etnis Rohingya sudah tidak diakui sebagai salah satu dari 135 etnis masyarakat di Myanmar sejak tahun 1982²⁹. Dengan diperkeruh oleh informasi-informasi yang menyatakan bahwa keberadaan etnis Rohingya di Myanmar menimbulkan banyak kerusuhan yang menggunakan senjata, hal tersebut dijadikan justifikasi oleh pemerintah Myanmar untuk memberikan ancaman pembunuhan bagi etnis Rohingya yang ada di Myanmar³⁰. Kondisi ini memaksa pengungsi Rohingya untuk terus mengungsi dari Myanmar ke negara-negara lain khususnya kepada negara terdekat yang dapat mereka jangkau salah satunya Indonesia.

Berdasarkan hubungan yang kelim antara pemerintah Myanmar yang memperlakukan etnis Rohingya terpaksa mengungsi dari diri, maka keinginan etnis Rohingya untuk mengungsi dari diri semakin meningkat dengan adanya anggapan tidak mau kembali ke negara asal karena takut terbunuh.

²⁷Sriliza., Yusrain., Karlina, EM., (2025). *Sejarah Muslim Rohingya*. Halaman 6.

²⁸Ibid. Halaman 12.

²⁹Pangestu, FB. (2024). *Pengakuan Kewarganegaraan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar*. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*. Halaman 2.

³⁰Ardhi, SN. (2023). *Pengamat UGM: Perlu Diplomasi Lebih Gigih Selesaikan Kasus Pengungsi Rohingya*.

ALASAN INDONESIA MENGUBAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI TERHADAP PENINGKATAN PENGUNGGI ROHINGYA TAHUN 2023

Bagi Indonesia, fenomena meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya ke Indonesia dinilai semakin hari semakin mengeksploitasi kemampuan Indonesia dengan mengatasnamakan kemanusiaan³¹. Diperparah oleh perilaku pengungsi Rohingya yang menimbulkan dampak-dampak negatif bagi masyarakat Aceh serta sistem keamanan Indonesia perihal mobilisasi keluar masuknya pengungsi Rohingya hingga tahun 2023. Hal tersebut mengarah pada sikap *taken for granted* yang dilakukan pengungsi Rohingya atas kebaikan yang telah diberikan oleh masyarakat Aceh serta Indonesia sebagai negara.

Menghadapi hal tersebut, peneliti melihat adanya perkembangan fenomena yang dilakukan oleh Indonesia dari skala kecil hingga skala besar mengenai sikap-sikap menolak pengungsi Rohingya. Akumulasi dari sikap tersebut diestafetkan mulai dari masyarakat Aceh, Presiden Joko Widodo, serta Menlu Retno Marsudi yang memiliki kesinambungan dalam mengkonstruksi identitas pengungsi Rohingya sebagai ancaman bagi Indonesia di tahun 2023. Sehingga, terdapat pola sekuritisasi dalam menganalisis fenomena kebijakan luar negeri Indonesia terhadap peningkatan pengungsi Rohingya di tahun 2023.

Berikut adalah pembahasan mengenai hal-hal yang menyebabkan kebijakan luar negeri Indonesia berubah dalam memandang pengungsi Rohingya di tahun 2023 dari skala kecil hingga skala besar. Hal-hal berikut mengakibatkan pengungsi Rohingya dianggap sebagai *the existential threat* oleh Indonesia sehingga kehadirannya dipandang secara skeptis bahkan mengalami penolakan yang signifikan. Maka dari itu, pola kebijakan luar negeri Indonesia berubah ke arah sekuritisasi yaitu mengamankan kestabilan negara dari pengungsi Rohingya yang dianggap sebagai *the existential threat*.

³¹Nora, Alfi. (2023). *Marak Warga Aceh Tolak Pengungsi Rohingya, Legislator Golkar Tegaskan Utamakan Rakyat*.

Masyarakat Aceh Sebagai *The Security Agent* Menghadapi Kehadiran Pengungsi Rohingya Sebagai *The Existential Threat*

Bagi penstudi Konstruktivisme sekuritisasi, *the security agent* merupakan kelompok masyarakat dalam mengkonstruksi suatu isu yang dianggap mengganggu (non-keamanan) menjadi urgensi keamanan. Isu mengganggu tersebut digambarkan sebagai *the existential threat* yang umumnya datang dari entitas luar negeri³². Identitas ancaman yang tercipta dari konstruksi sosial tersebut dapat mempengaruhi interaksi sosial antara *the security agent* dengan *the existential threat* hingga menyita perhatian elit politik negara untuk bertindak.

Peneliti menganalisis masyarakat Aceh sebagai *the security agent* dari Indonesia yang sedang beradaptasi dengan pengungsi Rohingya yang kian hari kian meningkat dan menimbulkan berbagai macam gangguan. Peneliti menganalisis pengungsi Rohingya sebagai entitas luar negeri yang dikonstruksi sebagai *the existential threat* oleh masyarakat Aceh.

Konstruksi identitas tersebut muncul akibat hasil dari interaksi sosial antara masyarakat Aceh dan pengungsi Rohingya. Setelah masyarakat Aceh merasa dirugikan dari perilaku pengungsi Rohingya, maka pola-pola interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya berubah kearah mengamankan diri dari hal yang dianggap mengganggu/mengancam.

Masyarakat Aceh sejatinya adalah makhluk sosial yang diharuskan hidup berdampingan secara langsung dengan pengungsi Rohingya. Keramah-tamahan masyarakat Aceh sebagai warga negara Indonesia yang berhadapan secara langsung akan dipengaruhi dengan bagaimana pengungsi Rohingya menyikapi sikap murah hati yang mereka terima. Meskipun interaksi sosial dari kedua belah pihak telah diperkuat oleh kesamaan identitas berupa memeluk agama yang sama³³, namun hal tersebut tidak cukup untuk mempertahankan konsistensi masyarakat Aceh dalam menolong pengungsi Rohingya sebagai saudara sesama muslim.

³²Tulga, AY. (2022). *Constructivism, Identity, and Discourse in Terrorism*. Halaman 6.

³³Ilma, A., Wulandari, I., Razan, MR. (2024). *Penolakan Kedatangan Gelombang Pengungsi Rohingya di Aceh dalam Perspektif Etika dan Moral*. Halaman 56.

Upaya *Speech Act* Berisi Sentimen Skeptis Indonesia Terhadap Perilaku Pengungsi Rohingya

Bagi penstudi Konstruktivisme sekuritisasi, fenomena *speech act* merupakan upaya elit politik mengkonstruksi isu non keamanan menjadi isu keamanan. Hal tersebut memiliki empat pola utama. Pertama, elit politik yang dimaksud mengarah pada pemimpin negara. Kedua, pemimpin negara tersebut menyampaikan pidato untuk dapat diketahui secara konsen oleh audiens yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang sedang diteliti. Ketiga, meyakinkan audiens bahwa negara tersebut sedang menghadapi *the existential threat*. Keempat, pemimpin negara tersebut memanfaatkan media massa untuk mendominasi diskursus yang sedang dikonstruksi³⁴. Peneliti menggunakan konsep sekuritisasi *speech act* tersebut untuk mendeskripsikan kesinambungan fenomena yang terjadi dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap peningkatan pengungsi Rohingya tahun 2023.

Pertama, elit politik pemimpin negara tersebut awalnya berfokus pada Presiden Joko Widodo yang melegitimasi sikap Indonesia menolong pengungsi Rohingya berdasarkan Perpres No. 125/2016. Namun, seiring berjalannya waktu di sekitar 2021-2023, Presiden Joko Widodo memiliki banyak kesibukan. Sehingga, Presiden Joko Widodo mendelegasikan kewenangan untuk mengkaji ulang sikap Indonesia tersebut kepada kementriannya. Sehingga, peneliti melihat bahwa elit politik yang dimaksud tidak hanya terbatas pada presiden sebagai negara. Namun, dapat dilihat pula kepada elit politik yang dipilih oleh presiden untuk memengaruhi *quo vadis* kontinuitas/perubahan kebijakan luar negeri dalam menyikapi isu yang ada.

Pada tanggal 02 Desember 2023, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Mahfud MD selaku Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Indonesia. Instruksi yang diberikan yaitu mengkaji ulang kebijakan luar negeri Indonesia dihadapkan

³⁴Tulga, AY. (2022). *Constructivism, Identity, and Discourse in Terrorism*. Halaman 15.

dengan fenomena masyarakat Aceh yang mendesak Indonesia sebagai negara untuk menolak pengungsi Rohingya baik yang sudah menetap maupun sedang bertambah³⁵. Fenomena ini menunjukkan bahwa sikap suatu negara yang dicerminkan melalui kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh elit politik yang tidak terbatas pada Presiden sebagai pemimpin negara saja. Melainkan, bagaimana Presiden tersebut bekerja dengan menteri-menteri nya agar dapat mengerucutkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan negara tersebut pada masa nya.

Dilanjut pada tanggal 08 Desember 2023, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan (*statements*) dalam mengakomodir urgensi demonstrasi masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya tahun 2023. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa beliau menerima laporan yang menyatakan adanya keterlibatan pengungsi Rohingya dengan TPPO. Kondisi tersebut mengubah prioritas Indonesia untuk mendahulukan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat Aceh diatas kepentingan etnis Rohingya sebagai pengungsi³⁶. Meskipun tidak menyatakan secara tegas bahwa Presiden Joko Widodo menolak peningkatan pengungsi Rohingya tahun 2023, namun *statement* tersebut dapat menunjukkan bahwa Indonesia bersikap curiga dan skeptis. Sehingga, pengungsi Rohingya dapat dilihat sebagai ancaman (*the existential threat*) tidak hanya terpaku pada oknum yang tertangkap, melainkan kepada seluruh pengungsi Rohingya yang ada di Aceh secara general.

Lanjut pada poin kedua yaitu pemimpin negara mengungkapkan pernyataan secara publik agar dapat diterima secara konsen oleh audiens kebijakan luar negeri yang dikaji. Fenomena pernyataan pada *Press Release* tersebut menunjukkan bahwa upaya sekuritisasi *speech act* Presiden Joko Widodo ditujukan agar audiens secara konsen dapat menerima bahwa adanya perubahan diskursus sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. Dengan adanya pemberitaan tersebut, diharap dapat diterima oleh khalayak

³⁵Firdaus, Arie. (2023). *Jokowi Minta Menkopolkam Tuntaskan Soal Penolakan Pengungsi Rohingya*. *Benar News Indonesia*.

³⁶Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. (2023). *Press Statement of President of the Republic of Indonesia Regarding the Rohingya Refugees Entering Indonesia, at Merdeka Palace, Jakarta Capital Province, December 8, 2023*.

banyak mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap peningkatan pengungsi Rohingya tahun 2023.

Ketiga, meyakinkan audiens bahwa Indonesia sedang berhadapan dengan ancaman (*the existential threat*). Dengan diakuinya pengungsi Rohingya sebagai ancaman keamanan Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, hal tersebut menunjukkan bahwa urgensi masyarakat Aceh yang mendesak Indonesia telah terakomodir. Maka dari itu, pola-pola interaksi sosial antara Indonesia dengan pengungsi Rohingya tidak lagi terbatas sebagai saudara sesama muslim yang perlu tolong menolong. Melainkan, adanya sikap-sikap skeptis serta sentimen negatif untuk berinteraksi dengan entitas yang dianggap mengancam ketertiban negara.

Keempat, pemimpin negara memanfaatkan media massa untuk mendominasi diskursus yang sedang dikonstruksi. Dengan diberitakannya *statement* Presiden Joko Widodo dalam menolak pengungsi Rohingya tahun 2023, berita-berita pada media massa akan mendominasi konsen audiens secara luas dan lebih meyakinkan. Fenomena tersebut akan mengarahkan Indonesia untuk memiliki legitimasi yang dirasa disetujui oleh khalayak banyak terkait perubahan cara pandang Indonesia terhadap peningkatan pengungsi Rohingya 2023. Dominasi perubahan diskursus tersebut diisi dengan Indonesia yang menjustifikasi sikap skeptis nya berdasarkan temuan-temuan pengungsi Rohingya yang dianggap merugikan Indonesia baik untuk masyarakat Aceh maupun negara.

Berdasarkan analisis diatas, peneliti memaknai fenomena kebijakan luar negeri Indonesia terhadap peningkatan pengungsi Rohingya mengalami perubahan pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh adanya temuan-temuan yang mengungkapkan dampak negatif pengungsi Rohingya terhadap masyarakat Aceh, mobilisasi keluar masuk pengungsi Rohingya ke Indonesia secara legal, hingga sistem keamanan Indonesia terkait pengungsi.

Indonesia merespons hal tersebut dengan upaya sekuritisasi berisi *the security agent, speech act*, serta *the existential threat*. Upaya sekuritisasi tersebut menunjukkan bahwa sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya di tahun 2023 berubah. Tidak hanya terpaku melalui Perpres No.125/2016 serta identitas Indonesia sebagai *The Global Problem Solver & The Regional*

Leader in ASEAN. Melainkan, terdapat perkembangan fenomena yang dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat Aceh dan Indonesia sebagai negara dalam menggambarkan pengungsi Rohingya sebagai *the existential threat* yang perlu diamankan.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Peningkatan Pengungsi Rohingya Hingga Tahun 2023

Perlu diingat bahwa setelah melewati perjalanan 2021-2022, identitas Indonesia yang terkonstruksi secara sosial di tingkat lokal maupun internasional mengarah pada memampukan diri untuk bersikap solutif menghadapi peningkatan pengungsi Rohingya.

Konstruksi sosial tersebut dapat dihitung dari beberapa latar belakang berikut. Pertama, hadirnya Perpres No.125/2016 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai sikap Indonesia terhadap pengungsi luar negeri³⁷. Kedua, diestafetkan pada sikap Indonesia sebagai *The Regional Leader* di tingkat ASEAN sekitar tahun 2021-2022³⁸. Ketiga, digambarkan sebagai *The Global Problem Solver* dalam menghadapi peningkatan pengungsi Rohingya ke Indonesia untuk berkontribusi menurunkan tensi ketidakstabilan politik-keamanan Myanmar tahun 2021³⁹. Maka dari itu, konsen yang terbentuk ialah Indonesia menerima pengungsi Rohingya. Namun, peneliti berpendapat bahwa identitas yang digunakan untuk berinteraksi terhadap pengungsi Rohingya tersebut dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menguntungkan Indonesia, di sisi lain dapat merugikan.

Sisi positifnya yaitu sikap solutif Indonesia mendapat pujian dan afirmasi positif dari oleh masyarakat Aceh hingga ke lingkup internasional seperti ASEAN, IOM, serta UNHCR⁴⁰. Hal tersebut dapat memengaruhi audiens kebijakan luar negeri Indonesia bahwa sikap keramahan

³⁷Hukum Online. (Diakses pada 2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*. Halaman 1

³⁸Rachmat, AN. (2022). *Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Indonesia dalam Bidang Politik dan Keamanan di ASEAN Pada Krisis Politik Myanmar Tahun 2021*. Halaman 171-191.

³⁹Rosyidin, M. (2021). *Identitas Dalam Kebijakan Luar Negeri: Peran Indonesia Pasca Kudeta Militer di Myanmar Tahun 2021*. Halaman 83.

⁴⁰UNHCR Indonesia. (2023). *14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya*.

dapat dilakukan untuk pengungsi Rohingya yang sedang tidak diuntungkan akibat dari ketidakstabilan politik-keamanan Myanmar tahun 2021.

Namun pada sisi negatif nya, Indonesia melonggarkan sistem keamanan yang memperderas arus pengungsi Rohingya ke Indonesia di sekitar tahun 2021-2023. Mengapa? Karena munculnya anggapan bahwa Indonesia akan selalu memampukan diri untuk mengakomodir kebutuhan etnis Rohingya sebagai pengungsi yang dimotivasi oleh nilai-nilai kemanusiaan serta solidaritas sesama Muslim di tingkat lokal maupun global⁴¹. Sehingga, pengungsi Rohingya dapat berekspektasi untuk mendapat perlakuan ramah dari Indonesia. Maka dari itu, muncul urgensi Indonesia untuk meminimalisir peningkatan pengungsi Rohingya ke Indonesia di waktu-waktu mendatang.

3. KESIMPULAN

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dari tahun 2021-2023 mengalami perubahan. Awalnya, pola kebijakan Indonesia mengarah pada sikap inklusif yang memudahkan etnis Rohingya mengungsikan diri ke Indonesia khususnya daerah Aceh. Namun, sikap inklusif tersebut membuat Indonesia dihadapkan dengan ancaman-ancaman keamanan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh maupun Indonesia sebagai negara.

Pengungsi Rohingya dikonstruksi secara sosial sebagai ancaman keamanan Indonesia oleh masyarakat Aceh dan elit politik Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia bersikap skeptis sehingga mengakibatkan kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh cenderung mendapat penolakan.

Peneliti menemukan pola-pola sekuritisasi pada fenomena tersebut yang dapat dikaitkan sebagai berikut. Pertama, masyarakat Aceh menjadi *the security agent* yang mengkonstruksi ulang cara pandang mereka terhadap pengungsi Rohingya di tahun 2021-2023. Presiden Joko Widodo serta Menlu Retno Marsudi sebagai elit politik Indonesia yang menggunakan *speech act* untuk validasi masyarakat Aceh yang mengalami kesulitan menerima

⁴¹Nabilah, O., Anggian, KY., Bakti, AMF. (2024). *Solidaritas Aceh Untuk Pengungsi Rohingya: Fachrul Reza Pada Media Getty Image, Postmodernisme*. Halaman 71.

pengungsi Rohingya secara terus-menerus. Serta pengungsi Rohingya yang dikonstruksi sebagai *the existential threat* oleh Indonesia karena dianggap mengancam keamanan khususnya mobilisasi keluar masuk Indonesia secara ilegal, hingga melakukan tindak melanggar hukum dan adat Aceh maupun Indonesia.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dugis, Vinsensio. (2008). *Explaining Foreign Policy Change*. https://journal.unair.ac.id/filerPDF/02_Dugis.pdf . Halaman 101.
- Shalihah, Fithriatus. Nur, Muhammad. (2021). *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. UAD Press. Yogyakarta, Indonesia. https://eprints.uad.ac.id/36681/4/BUKU_Fithriatus%20S_Penanganan%20Pengungsi%20di%20Indonesia.pdf . Halaman 1.
- Kegley, Charles W. and Wittkopf, Eugene R. (2004). *World Politics: Trend & Transformation Ninth Edition*. Halaman 53.

Artikel/Jurnal

- Akbar, R., Bukhari, FR., Hamadi, IG. (2024). *Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh: Evaluasi Kebijakan Indonesia Terhadap Ancaman Keamanan*. Jurnal Indonesia Foreign Policy Review Volume 11. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=ifpr> . Halaman 2, 5, dan 6.
- Azhari, Y., Wilopo., (2022). *Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya dan Masyarakat Lokal Indonesia*. Jurnal Pengabdian Mandiri Volume 1 Nomor 3. Halaman 482
- Bojang, AS. (2018). *The Study of Foreign Policy in International Relations*. Halaman 1
- Fikri, AA., Mayola, J. (2024). *Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023*. Journal Emerald of Economics and Social Science Volume 3 Number 2. <https://jurnalsains.id/index.php/emerald/article/view/159> . Halaman 58.
- Hamdi, MA., Maulidia, H., dan Firlana, H. (2023). *Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingya Pada Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Volume 6 No. 1 Tahun 2023. Halaman 61.

- Hermann, Margaret. (2001). *How Decision Units Shape Foreign Policy: A Theoretical Framework*. <https://www.jstor.org/stable/3186565> . Halaman 56.
- Ilma, A., Wulandari, I., Razan, MR. (2024). *Penolakan Kedatangan Gelombang Pengungsi Rohingya di Aceh dalam Perspektif Etika dan Moral*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume 10 Nomor 14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13342961> . Halaman 56.
- Inradipradana, RK & Haridha, F. (2023). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022*. *Jurnal Indonesian Perspective* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2023. Halaman 215.
- Karina, Maria Elsa. (2020). *Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya*. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* Volume 2 Nomor 2. Halaman 161.
- Lipschutz, Ronnie D. (2002). *Securitization and Desecuritization: Ole Waever*. *Journal of On Security*, Chapter 3. <https://www.libraryofsocscience.com/assets/pdf/Waever-Securitization.pdf> . Halaman 14.
- Lune & Berg. (2017), *Qualitative Research Methods for the Social Sciences: 9th Edition*. Jurnal Pearson Education. Halaman 12., 41., 42., 161., 176.
- McDonald, Matt. (2008). *Securitization and the Construction of Security*. *European Journal of International Relations*. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354066108097553> . Halaman 566.
- Nabilah, O., Anggian, KY., Bakti, AMF. (2024). *Solidaritas Aceh Untuk Pengungsi Rohingya: Fachrul Reza Pada Media Getty Image, Postmodernisme*. *Jurnal Komunikasi Sosial dan Politik UMKO* Volume 4 Nomor 2. Halaman 71.
- Pangestu, FB. (2024). *Pengakuan Kewarganegaraan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar*. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*. Halaman 2.
- Rachmat, AN. (2022). *Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Indonesia dalam Bidang Politik dan Keamanan di ASEAN Pada Krisis Politik Myanmar Tahun 2021*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Volume 8 Nomor 2. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/1108/354> . Halaman 171-191.
- Rahman, Junita Budi & Bainus, Arry. (2024). *Agama dalam Hubungan internasional (Religion in International Relations)*. *Journal of International Studies* Volume 9 Nomor 1. Halaman 14.
- Rosyidin, M. (2021). *Identitas Dalam Kebijakan Luar Negeri: Peran Indonesia Pasca Kudeta Militer di Myanmar Tahun 2021*. *Jurnal Hubungan Luar Negeri* Volume 6 Nomor 1. ISSN 2614-8560. <https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/15633/1/Identitas.pdf> . Halaman 69-70, 74, dan 83.
- Suryono, Mitra. (2016). *Indonesia Fact Sheet December 2016*. UNHCR Indonesia Website. <https://www.unhcr.org/id/media/indonesia-fact-sheet-december-2016-pdf> . Halaman 2.
- Tulga, AY. (2022). *Constructivism, Identity, and Discourse in Terrorism*. *Journal of Politics and Policy* Volume 4 Nomor 2.

https://www.researchgate.net/profile/Ahmet-Tulga/publication/373862568_Constructivism_Identity_and_Discourse_in_Terrorism/links/6500826425ee6b7564e6c6f3/Constructivism-Identity-and-Discourse-in-Terrorism.pdf Halaman 6 & 15.

Website

- Ardhi, SN. (2023). *Pengamat UGM: Perlu Diplomasi Lebih Gigih Selesaikan Kasus Pengungsi Rohingya*. <https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-perlu-diplomasi-lebih-gigih-selesaikan-kasus-pengungsi-rohingya/#:~:text=Dr.%20Dafri%20Agussalim%2C%20M.A.,%2C%20tempat%20tinggal%2C%20dan%20sebagainya>.
- BBC News. (2023). *Pengungsi Rohingya Tembus 1.600 Orang, Mengapa Nelayan Aceh Menolong Mereka?* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nye1ewp2xo>
- BBC News Indonesia. (2023). *Bara di Balik Penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh, 'Saya Sebelas Hari di Laut, Makan Sehari Sekali'*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxe1j526e6vo>
- Bestari, Novina Putri. (2021). *Jokowi: Demi Kemanusiaan, RI Tampung 105 Pengungsi Rohingya*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211231201107-4-303653/jokowi-demi-kemanusiaan-ri-tampung-105-pengungsi-rohingya#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Pe%20merintah%20Republik%20Indonesia,untuk%20menampung%20sementara%20105%20pengungsi%20Rohingya%20di>
- Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. (2023). *Press Statement of President of the Republic of Indonesia Regarding the Rohingya Refugees Entering Indonesia, at Merdeka Palace, Jakarta Capital Province, December 8, 2023*. <https://setkab.go.id/en/press-statement-of-president-of-the-republic-of-indonesia-regarding-the-rohingya-refugees-entering-indonesia-at-merdeka-palace-jakarta-capital-province-december-8-2023/>
- Fakhrurrazi. (2021). *Izinkan Pengungsi Rohingya Berlabuh, Nelayan Aceh Berterima Kasih Kepada Jokowi*. <https://www.rmolaceh.id/izinkan-pengungsi-rohingya-berlabuh-nelayan-aceh-berterima-kasih-kepada-jokowi>
- Firdaus, Arie. (2023). *Jokowi Minta Menkopolhukam Tuntaskan Soal Penolakan Pengungsi Rohingya*. *Benar News Indonesia*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/jokowi-minta-mahfud-tutaskan-kasus-pengungsi-rohingya-12042023115750.html>
- Hukum Online. (Diakses pada 2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*. Halaman 1.
- Nora, Alfi. (2023). *Marak Warga Aceh Tolak Pengungsi Rohingya, Legislator Golkar Tegaskan Utamakan Rakyat*. *Website Dialeksis*. <https://www.dialeksis.com/nasional/marak-warga-aceh-tolak-pengungsi-rohingya-legislator-golkar-tegaskan-utamakan-rakyat/>
- NU Online. 2023. *Awal Mula Kebaikan Orang Aceh Terima Pengungsi Rohingya Tapi Akhirnya Dikecewakan*. <https://nu.or.id/nasional/awal->

[mula-kebaikan-orang-aceh-terima-pengungsi-rohingya-tapi-akhirnya-dikecewakan-pG2hi](#)

- Nurhalizah, Mevy Eka. (2025). *Dinamika Identitas Agama dan Etnis dalam Penerimaan Pengungsi Rohingya*.
https://nursyamcentre.com/artikel/riset_sosial/dinamika_identitas_agama_dan_etnis_dalam_penerimaan_pengungsi_rohingya#:~:text=Pada%20tahun%20tahun%20pertama%20kedatangan,%2C%20makanan%2C%20dan%20kebutuhan%20lainnya.
- Pangwa, Jamal. (2023). *Ratusan Masyarakat Pidie Aceh Demo Tolak Pengungsi Rohingya*. Website Okevideo.
<https://video.okezone.com/play/2023/12/20/1/175310/ratusan-masyarakat-pidie-aceh-demo-tolak-pengungsi-rohingya>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*. <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/#:~:text=Pengaturan%20Perpres%20Nomor%20125%20Tahun%202016%20telah,sehingga%20dapat%20difasilitasi%20dan%20dibiyai%20oleh%20IOM>.
- UNHCR Indonesia. (2023). *14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya*.
<https://www.unhcr.org/id/berita/press-releases/14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya>